

EFEKTIVITAS KEGIATAN WORKSHOP DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENETAPKAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) Studi Kasus Pada Gugus Pejeng, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar 2013-2014

Oleh:

I Wayan Sudanta

Kementerian Agama Kabupaten Gianyar Jalan Kepundung Nomor 8
wayansudanta@gmail.com

Abstract

Through the workshop it can be observed that the teacher ability has been increasing in deciding the minimum completeness criterion of the Hinduism teachers in the elementary schools (SD) of the Pejeng cluster, Tampaksiring district, Gianyar regency within the year of study of 2013/2014. The elementary school Hinduism teachers in Pejeng cluster have given a very positive response towards the minimum completeness criterion deciding activity through a workshop. Therefore, the workshop activity has given a positive impact on the teacher competence in deciding the minimum completeness criterion.

Abstrak

Workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014. Guru-guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar memberikan respon yang sangat positif terhadap kegiatan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui Workshop. Dengan demikian kegiatan Workshop memberikan dampak positif terhadap kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal.

Kata kunci: *Workshop, Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku anak agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada (Sugala, 2005: 3). Dengan

demikian Pendidikan juga didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan baik itu proses perbuatan dan cara mendidik..

Pendidikan memiliki peran dan fungsi yang

strategis dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas. Mutu pendidikan tercermin dari mutu Sumber Daya Manusia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Upaya tersebut hampir mencakup semua komponen pendidikan seperti: meningkatkan kualitas guru dengan mengadakan seminar-seminar, *workshop*, pengadaan sarana prasarana dan manajemen pendidikan, mengadakan dan menjamin kualitas guru melalui sertifikasi guru.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional semua pihak perlu berusaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang mendukung baik dari jalur pendidikan formal maupun informal. Pendidikan keluarga sebagai bagian dari pendidikan informal mempunyai peranan yang cukup penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Sedangkan pembelajaran di sekolah memerlukan suatu iklim pembelajaran yang kondusif dengan pembelajaran iklim yang kondusif yang dimaksud adalah penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar. Kita ketahui berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan banyak tergantung pada tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau lembaga yang melaksanakannya.

Dalam implementasi pendidikan dilakukan dengan memperhatikan beberapa strategi pembelajaran, yang meliputi pendekatan, teknik pembelajaran, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ketika terjadi proses transformasi pengetahuan, maka tidak bisa lepas dari yang namanya evaluasi atau penilaian. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapa pun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan Kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta

didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva. Acuan Kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui Kriteria ketuntasan minimal.

Dalam implementasinya di lapangan ternyata terdapat beberapa permasalahan yang klasik terkait dengan kompetensi guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) gugus 1 Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Kenyataan di lapangan yang dijumpai oleh peneliti, kebetulan bertugas sebagai pengawas yang mewilayahi guru agama Hindu tingkat SD Kecamatan Tampaksiring, terjadi suatu perbedaan persepsi serta pemahaman terkait dengan kompetensi guru dalam menetapkan KKM. Sehingga kecenderungan yang terjadi dalam menentukan KKM guru tidak berdasarkan analisis dan tidak memperhatikan prinsip serta langkah-langkah penetapan KKM. Oleh sebab itu maka perlu adanya upaya berupa kegiatan pada awal tahun pelajaran yang dapat memberikan informasi kepada guru yang dijadikan pedoman dalam penetapan KKM.

Mengacu pada uraian tersebut di atas kegiatan Workshop dipandang perlu dan representatif digunakan sebagai upaya kegiatan yang memberikan wadah bagi para guru untuk memahami esensi dari cara menentukan KKM sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Hasil observasi lapangan memberikan suatu gambaran terkait dengan rendahnya kemampuan guru dalam menentukan KKM yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kurangnya tuntutan supervisor (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah), terkait dengan kompetensi guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar, pada gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- b. Belum adanya persamaan persepsi terkait tata cara serta tahapan yang diperlukan guru agama Hindu dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal, sehingga dalam implementasinya ketika guru menentukan KKM guru cenderung mengabaikan tahapan penyusunannya, dan men-

anggap bahwa penyusunan KKM tersebut sebagai sebuah formalitas belaka, sebagai bentuk implikasi dari terbatasnya pertemuan, atau sosialisasi antar guru agama Hindu.

Beranjak dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan kemampuan guru Agama Hindu Sekolah Dasar Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014 dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ?

Berdasarkan kajian awal diduga tindakan yang berupa Workshop untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal pada mata pelajaran Agama Hindu Tingkat Sekolah Dasar Khususnya pada Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014. Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, dan pemecahan masalah yang telah dipaparkan di atas maka hipotesis tindakan dapat dirumuskan sebagai berikut "Efektivitas Kegiatan Workshop dapat meningkatkan kemampuan guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal pada mata pelajaran Agama Hindu Tahun Pelajaran 2013/2014".

Adapun tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan guru khususnya pada guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014 dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal khususnya pada mata pelajaran Agama Hindu. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah (1) Melalui Workshop dapat memberikan pengalaman belajar bagi guru, karena melalui Workshop guru khususnya Guru Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar diberikan materi dan latihan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai dengan mata pelajarannya. (2) Guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014 memiliki kemampuan dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal sehingga proses belajar mengajar lebih baik.

II. PEMBAHASAN

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Perangkat Penilaian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dari Departemen Pendidikan Nasional, dijelaskan: Pengertian, Fungsi, dan Mekanisme Penetapan KKM yang isinya sebagai berikut:

a. Pengertian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapa pun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan Kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik penilaian.

Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva. Acuan Kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui Kriteria ketuntasan minimal.

Kriteria Ketuntasan Minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM.

1. Kriteria Ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan Pendi-

dikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap.

2. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahui. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria Ketuntasan Minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.
3. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat.

Mutu Pendidikan dan Profesi Guru

Profesi guru yang sebenarnya sangat berkaitan erat dengan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat dijelaskan karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan seperti guru, sarana prasarana, kurikulum, dan proses belajar mengajar serta sistem penilaian. Meskipun demikian, faktor guru tidak dapat disamakan dengan faktor-faktor lainnya.

Guru adalah sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengarahkan dan memanfaatkan faktor-faktor lainnya sehingga tercipta proses belajar mengajar yang bermutu. Tanpa mengabaikan peran faktor-faktor lain, guru dapat dianggap sebagai faktor tunggal yang paling menentukan terhadap meningkatnya mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil studi.balitbang pada tahun 1992, ditemukan bahwa guru yang bermutu memberikan pengaruh yang paling tinggi terhadap mutu pendidikan. Dalam studi ini, guru yang bermutu diukur dengan empat faktor utama, yaitu kemampuan profesional, upaya profe-

sional, kesesuaian waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, dan kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaannya. Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kemampuan profesional guru terdiri dari kemampuan intelegensi, sikap, dan prestasinya dalam bekerja.
- b. Upaya profesional guru adalah mentransformasikan kemampuan profesional yang dimilikinya ke dalam tindakan mengajar yang nyata. Upaya profesional guru tersebut ditunjukkan oleh kegiatannya baik dalam mengajar maupun dalam menambah serta meremajakan pengetahuan dan kemampuannya menguasai keahlian mengajarnya baik keahlian dalam menguasai materi pelajaran, penggunaan bahan-bahan pengajaran, maupun mengelola kegiatan belajar siswa.
- c. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (*teacher's time*) menunjukkan intensitas waktu yang digunakan oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas-tugas guru, karena konsepsi waktu belajar (*time on task*) yang diukur dalam belajar siswa secara perorangan, telah ditemukan sebagai salah satu prediktor terbaik dari mutu hasil belajar siswa.
- d. Kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaannya mempunyai asumsi bahwa guru yang dipersiapkan untuk mengajar suatu mata pelajaran dianggap bermutu jika guru tersebut mengajar mata pelajaran yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka kesesuaian guru mengajar dengan mata pelajaran yang dialaminya di LPTK merupakan persyaratan yang mutlak untuk menilai mutu profesional seorang guru.

3. Tinjauan Tentang Workshop

Pengetahuan, keterampilan dan kecakapan manusia dikembangkan melalui belajar. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh ketiga aspek tersebut seperti belajar dalam sekolah, luar sekolah, tempat bekerja, sewaktu bekerja, melalui pengalaman, dan melalui *workshop*. *Workshop* adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bidang sejenis (pendidikan) untuk menghasilkan karya nyata (Badudu, 1988: 403). Lebih lanjut, Harbinson (1973: 52) mengemukakan bahwa pendidikan dan pelatihan secara umum

diartikan sebagai proses pemerolehan keterampilan dan pengetahuan yang terjadi di luar sistem persekolahan, yang sifatnya lebih heterogen dan kurang terbakukan dan tidak berkaitan dengan lainnya, karena memiliki tujuan yang berbeda.

Dalam banyak bidang pelatihan (*Workshop*), hal tersebut memang sangat sulit untuk tidak mengatakannya mustahil (dilakukan validasi dan evaluasi). Bidang yang dimaksud misalnya manajemen atau pelatihan hubungan manusia sifatnya. Dalam hal ini, semua bentuk pelatihan (*Workshop*) tidak dapat memperlihatkan hasil yang objektif. Pelatihan umumnya mempunyai masalah mengenai prestasi penatar dalam mengajar, yaitu masalah evaluasi dan validasi kelangsungannya. Jika pelajaran telah diajarkan dengan baik dan penatar belajar pelajaran tersebut sesuai dengan ukuran penatarnya maka efektivitas pelatihan sudah dianggap valid. Penilaiannya juga dilakukan langsung, karena jika si penatar selalu menjawab enam untuk soal tiga kali maka ia selalu benar.

Pelatihan merupakan proses perbantuan (*facilitating*) guru untuk mendapatkan keefektifan dalam tugas-tugas mereka sekarang dan masa yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan berpikir, bertindak, keterampilan, pengetahuan dan sikap yang sesuai (Dahana and Bhatnagar, 1980: 672). Pelatihan pada dasarnya berkenaan dengan persiapan pesertanya menuju arah tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat ia bekerja serta sekaligus memperbaiki unjuk kerja, sedang pendidikan berkenaan dengan membukakan dunia bagi peserta didik untuk memilih minat, gaya hidup kariernya.

Kerangka Berpikir

Dalam kaitannya dengan pembinaan kemampuan guru melalui *Workshop*, maka Armstrong (1990: 209) bahwa tujuan *Workshop* adalah untuk memperoleh tingkat kemampuan yang diperlukan dalam pekerjaan mereka dengan cepat dan ekonomis dan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada sehingga prestasi mereka pada tugas yang sekarang ditingkatkan dan mereka dipersiapkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Siswanto (1989: 139) mengatakan *Workshop* bertujuan untuk memperoleh nilai tambah seseorang yang bersangkutan, terutama

yang berhubungan dengan meningkatnya dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersangkutan. *Workshop* dimaksud untuk mempertinggi kemampuan dengan mengembangkan cara-cara berpikir dan bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugas pekerjaan termasuk tugas dalam melaksanakan evaluasi diri (As'ad, 1987: 64).

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui kegiatan *Workshop* yang lebih menekankan pada metode kolaboratif konsultatif akan memberikan kesempatan *sharing* antara satu guru dengan guru lain. Dengan demikian pemahaman terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal dapat ditingkatkan baik dalam teoritisnya maupun implementasinya. Dengan demikian dapat diduga bahwa melalui *Workshop* dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (*action research*) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui *Workshop* khususnya pada guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun pelajaran 2013/2014. Tindakan yang akan dilakukan adalah *Workshop* Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Jenis penelitian tindakan yang dipilih adalah jenis emansipatori. Jenis emansipatori ini dianggap paling tepat karena penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada wilayah kerja peneliti sendiri berdasarkan pengalaman sehari-hari. Dengan kata lain, berdasarkan hasil observasi, refleksi diri, guru bersedia melakukan perubahan sehingga kinerjanya sebagai pendidik akan mengalami perubahan secara meningkat. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan model Kemmis yang terdiri atas empat langkah, yakni: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi (Wardhani, 2007: 45).

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dan langkah-langkah setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian dilakukan pada guru Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng,

Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Pemilihan lokasi penelitian, karena sekolah tersebut merupakan sekolah binaan peneliti. Di samping itu, dari hasil supervisi ditemukan kelemahan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dari bulan Juli sampai dengan September 2013 mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan.

Subjek penelitian ini adalah guru-guru Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar yang berjumlah 15 orang, terdiri atas 12 orang guru tetap, dan 3 orang guru tidak tetap. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Prosedur penelitian ini dilakukan dalam dua siklus masing-masing siklus terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sedangkan indikator keberhasilan penelitian ini adalah :

- a. Proses pelaksanaan Workshop, guru minimal :
 - Siap secara mental dan fisik = 85 %
 - Kesiapan bahan = 85 %
 - Kehadiran = 90 %
 - Kesiapan Laptop = 60 %
- b. Hasil Pelaksanaan Workshop.
 - 85 % guru menetapkan KKM sesuai dengan kriteria diatas.
 - 85 % guru memperoleh nilai baik dan amat baik.

Apabila kurang dari 85 % guru tidak memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, berarti tindakan dianggap belum berhasil. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dan dilaksanakan pada siklus II.

Hasil Penelitian

Gambaran hasil yang didapat berdasarkan rekaman fakta/observasi di lapangan, para guru Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014 pada awalnya pemahaman terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal masih sangat kurang, hal ini dikarenakan persepsi guru menganggap bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal tidak terlalu penting, di samping itu acuan, pelatihan, atau sosialisasi KKM juga kurang. Dari 15 orang guru yang dapat dihubungi dan diobservasi diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Menetapkan KKM dengan analisis dan memenuhi mekanisme penetapan 0 orang (0 %).
- b. Menetapkan KKM dengan analisis dan memenuhi mekanisme, tetapi tidak disahkan oleh Kepala Sekolah, dan pernah pelatihan KKM 2 orang (13,3 %)
- c. Menetapkan KKM tanpa analisis tetapi pernah pelatihan 1 orang (6,67 %)
- d. Menetapkan KKM tanpa analisis, karena belum pernah pelatihan 12 orang (80 %)

Dengan kondisi awal seperti ini perlu adanya tindakan nyata yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal berupa Workshop.

Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta yang berjumlah 15 orang dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan, diperoleh data seperti tampak pada tabel 4.1.

Dari tabel 4.1. tampak bahwa: pada aspek kesiapan mental dan fisik; 10 orang 66,67 % peserta siap dan 5 orang atau 33,33 % tergolong belum siap. Pada aspek kesiapan bahan; tampak 8 orang atau 53,33 % peserta siap dan 7 orang atau 46,47 % belum siap. Pada aspek kehadiran guru tampak 11 atau 73,33 % hadir dan 4 orang atau 26,67 tidak hadir. Pada aspek kesiapan laptop tampak 3 orang atau 20,00 % siap dan 12 orang atau 80,00 % belum siap.

Berdasarkan dekripsi ini tampaknya kesiapan guru dalam mengikuti Workshop belum memenuhi kriteria keberhasilan untuk semua aspek. Dari hasil evaluasi terhadap penetapan KKM yang dibuat oleh 39 orang yang mengikuti Workshop pada siklus I seperti tampak pada tabel 4.2.

Dari tabel 4.2. pada aspek Penetapan KKM mata pelajaran memperhatikan kompleksitas, daya dukung dan intake dalam katagori baik, pada aspek KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK, dan terakhir mata pelajaran dalam katagori cukup, aspek pengesahan oleh Kepala Sekolah berada pada kagori baik, kemudian untuk aspek no. 4 dan 5 bagaimanapun caranya guru mendapatkan KKM pasti disosialisasikan pada siswa, orang tua, dan ditulis dalam LHB.

Berdasarkan dekripsi pada tabel 4.1. dan 4.2. tampaknya kemampuan guru Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal, be-

Tabel 4.1.

Rangkuman hasil observasi tentang kesiapan guru dalam mengikuti Workshop pada siklus I.

	Aspek Yang Diamati							
	Kesiapan mental dan fisik guru		Kesiapan Bahan		Kehadiran Guru		Kesiapan Laptop	
	S	TS	S	TS	H	TH	S	TS
Jumlah	10	5	8	7	11	4	3	12
Prosentase (%)	66,67	33,33	53,33	46,67	73,33	26,67	20,00	80,00
Pencapaian indikator Keberhasilan	Belum Tercapai		Belum Tercapai		Sudah Tercapai		Belum Tercapai	

Tabel 4.2

Rangkuman Hasil Penilaian Guru terhadap langkah-langkah Penetapan KKM pada siklus I.

No.	Aspek	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Prosentase
1.	Penetapan KKM mata pelajaran memperhatikan tiga aspek; kompleksitas, daya dukung, dan intake	1218	81,2	80,00
2.	KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK, dan terakhir mata pelajaran	1050	70,00	73,33
3.	Hasil penetapan KKM oleh guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah	1155	77,0	73,33
4.	KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan	1275	85	100
5.	KKM dicantumkan dalam LHB	1275	85	100
Jumlah Nilai		5793		
Rata-rata		79,64		85,33%

Keterangan :

Amat Baik = 85 < A ≤ 100

Cukup = 56 < C ≤ 70

Baik = 70 < B ≤ 85

Kurang = ≤ 56

lum memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan pada semua aspek (kecuali aspek 4 dan 5 diatas tadi).

Refleksi

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan kemampuan guru dalam menetapkan KKM pada siklus I belum menunjukkan hasil sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Setelah diadakan refleksi terhadap hasil yang diper-

oleh, diputuskan untuk memperbaiki dari segi kegiatan Workshop terutama memperjelas tentang aspek-aspek yang belum sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari hasil tersebut tampak secara umum guru membuat KKM per KD, dan tidak per indikator, dan dari 11 orang ikut Workshop, 3 orang tidak bisa menyerahkan hasil yang mungkin karena kesiapan fisik, mental, bahan, dan laptop memang kurang.

Dari masalah tersebut, diputuskan untuk

Tabel 4.3

Rangkuman Hasil Observasi Tentang Kesiapan Guru dalam mengikuti Workshop pada siklus II.

	Aspek Yang Diamati							
	Kesiapan mental dan fisik guru		Kesiapan Bahan		Kehadiran Guru		Kesiapan Laptop	
	S	TS	S	TS	H	TH	S	TS
Jumlah	13	2	13	2	15	0	12	3
Prosentase (%)	86,67	13,33	86,67	13,33	100	0	80,00	20,00
Pencapaian indikator Keberhasilan	Sudah Tercapai		Sudah Tercapai		Sudah Tercapai		Sudah Tercapai	

memperbaiki beberapa langkah dalam siklus I, yakni memfokuskan pada penetapan KKM per indikator, yang belum menyerahkan hasil, dan peningkatan sarana / bahan diadakan pada siklus II.

Pada siklus II, langkah-langkah yang diambil sesuai dengan refleksi hasil siklus I, dengan memfokuskan pada penjelasan aspek-aspek yang belum dipahami guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal, lebih menitik beratkan pada aspek pembimbingan secara individu. Dari 15 orang guru semua dilibatkan dalam siklus II untuk memperdalam pengetahuan tentang penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal. Setelah siklus II dijelaskan yang mengacu pada refleksi dan pemecahan masalah pada siklus I diperoleh data seperti tampak pada tabel 4.3.

Dari tabel 4.3. diatas, tampak bahwa : pada aspek kesiapan mental dan fisik 13 orang atau 86,67% siap dan 2 orang atau 13,33 % tidak siap. Pada aspek kesiapan bahan : tampak bahwa 13 orang atau 86,67% siap dan 2 orang atau 13,33 % tidak siap . Pada kehadiran 15 orang hadir atau 100 %. Pada aspek kesiapan laptop tampak bahwa 12 orang atau 80,00 % siap dan 3 orang atau 20,00 % tidak siap.

Berdasarkan deskripsi ini tampaknya kesiapan guru dalam mengikuti Workshop belum memenuhi 100 % untuk semua aspek, hal ini tidak terlepas dari kemungkinan karena dari 15 guru Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar tidak semuanya berstatus pegawai tetap namun ada 3 orang yang berstatus pengabdian, yang hanya masuk jika ada jam

mengajar.

Hasil evaluasi terhadap penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal oleh guru yang ikut Workshop pada siklus II diperoleh hasil seperti pada tabel 4.4.

Dari tabel 4.4. bila dilihat dari rata-rata secara umum dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal pada siklus II berada pada amat baik (rata-rata 87,30), namun ada satu aspek yang belum bisa 100 % , bahkan berada pada Kriteria cukup yaitu pada aspek 2 (KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK, terakhir mata pelajaran).

Untuk hal ini dapat saya jelaskan bahwa pada workshop penetapan KKM guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Sebanyak 3 orang guru tidak tetap (pengabdian) kesulitan dalam mengembangkan silabus, RPP, dan penetapan indikator pada KD, SK, dan mata pelajaran, sehingga akhirnya KKM dibuat tidak per indikator.

Penilaian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang respon guru terhadap kegiatan Workshop yang telah diharapkan dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Jika kita lihat dari Rata-Rata nilai guru yang dapat menetapkan KKM dengan memenuhi mekanisme dari kajian awal, siklus I, dan siklus II adalah 13,3, 79,64. dan kemudian 87,30. Sedangkan prosentase kajian awal, siklus I, dan siklus II 13,3%, 85,33% dan 94, 66%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Jadi dapat dikatakan bahwa respon guru sangat positif. Oleh karena itu, penerapannya perlu di-

Tabel 4.4

Rangkuman Hasil Penilaian Guru guru Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Dalam Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal pada siklus II.

No.	A s p e k	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Prosen-tase
1.	Penetapan KKM mata pelajaran memperhatikan tiga aspek: kompleksitas, daya dukung, dan intake.	1275	85	100
2.	KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK dan terakhir mata pelajaran	1055	70,33	73,33
3.	Hasil penetapan KKM oleh guru mata pelajaran disahkan oleh Kepala Sekolah	1368	91,20	100
4.	KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan	1425	95,00	100
5.	KKM dicantumkan dalam LHB	1425	95	100
Jumlah Nilai		6548		
Rata-rata		87,30		94,66 %

lanjutkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain.

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktifitas peserta dalam kegiatan Workshop tentang Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal bagi guru tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Disamping itu juga terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui Workshop penetapan KKM guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014. Dari siklus I ke siklus II pada masing-masing aspek dengan target ketercapaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui Workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal pada Guru Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2104.

K keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh pemahaman secara menyeluruh tentang Kriteria Ketuntasan Minimal Sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, maka penetapan

Kriteria Ketuntasan Minimal dengan baik. Mengoptimalkan pemahaman guru terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pembina intensip dalam bentuk penyelenggaraan Workshop menunjuk pada metode kooperatif konsultatif dimana diharapkan para guru berdiskusi, bekerja sama dan berkonsultasi secara aktif. Aktifitas ini akan sangat membantu mereka dalam memahami Kriteria Ketuntasan Minimal akhirnya nanti mereka mampu menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal.

Dalam kaitannya dengan pembinaan melalui Workshop, maka penelitian ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan Armstrong (1990: 209) bahwa tujuan *workshop* adalah untuk memperoleh tingkat kemampuan yang diperlukan dalam pekerjaan mereka dengan cepat dan ekonomis dan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada sehingga prestasi mereka pada tugas yang Sekarang ditingkatkan dan mereka dipersiapkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Siswanto (1989: 139) mengatakan *workshop* bertujuan untuk memperoleh nilai tambah seseorang yang bersangkutan, terutama yang berhubungan dengan meningkatnya dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersangkutan. *Workshop* dimaksudkan untuk mempertinggi kemampuan den-

gan mengembangkan cara-cara berpikir dan bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugas pekerjaan termasuk tugas dalam melaksanakan evaluasi diri (As'ad, 1987: 64).

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan *workshop* yang lebih menekankan pada metode kolaboratif konsultatif akan memberikan kesempatan *sharing* antara satu guru dengan guru lain. Dengan demikian, pemahaman terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal dapat ditingkatkan baik dalam teoritisnya maupun dalam implementasinya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Proses pelaksanaan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui Workshop untuk peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal dimulai dari supervisi awal. Supervisi awal dilakukan untuk mengenali masalah yang ada dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil supervisi kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan Workshop. Workshop dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang lebih menekankan pengetahuan praktis sehingga mudah dicerna oleh guru. Selanjutnya adalah memberikan latihan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Untuk meyakinkan guru membuat Kriteria Ketuntasan Minimal dilakukan presentasi pada masing-masing kelompok guru mata pelajaran. Peneliti mengamati

dan menilai Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan guru. Dari penilaian tersebut kemudian dievaluasi bagian mana yang belum sesuai dengan Kriteria, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan. Melalui tahapan tersebut guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal meningkat.

Terjadi peningkatan kesiapan peserta dalam kegiatan Workshop di pada guru Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Disamping itu juga, terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pembinaan berupa Workshop penetapan KKM guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dari siklus I ke siklus II dan mencapai target minimal yang telah ditetapkan yakni 85 %, artinya 85 % guru telah efektif dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui Workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014.

Guru-guru agama Hindu tingkat Sekolah Dasar (SD) Gugus Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar memberikan respon yang sangat positif terhadap kegiatan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui Workshop. Dengan demikian kegiatan Workshop memberikan dampak positif terhadap kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1998. *Pembinaan Profesi Guru dan Psikologi Pembinaan Personalial*, Jakarta ; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mathis dan Jackson . 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Prokton and W.M. Thornton 1983. *Latihan Kerja Buku Pegangan Bagi Para Manager*. Jakarta : Bina Aksara.
- Simamora, Henry. 1995. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIE YPKN.
- Sudibyo, Bambang. 1996 *Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Sungkowo M, 1996 *.Perangkat Penilaian Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.